

Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah Melalui Metode Transparansi Berdasarkan Konstruksi Pendidikan Kristen

Rifka Siva Br Sinaga

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene (STTE) Jakarta

Ratu Pranatalia

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene (STTE) Jakarta

Suardin Zai

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene (STTE) Jakarta

Korespondensi penulis: rsinaga@sttekumene.ac.id

Abstract. *It was found that there were still many irregularities in school financial management which resulted in the school financial system being unsystematic. The aim of this research is to find out how the school financial transparency system works to create a smart school with a management system with good integrity based on the construction of Christian education. The research method used in this research uses descriptive qualitative research methods. The results show that if financial transparency can be implemented well, many parties will benefit and schools will gain good accountability. It is hoped that with this research, more schools will be able to implement school financial transparency.*

Keywords: *finance; management; transparency; school; construction of Christian education*

Abstrak Pengelolaan keuangan sekolah yang didapati masih banyak penyimpangan yang mengakibatkan sistem keuangan sekolah menjadi tidak sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem transparansi keuangan sekolah demi terwujudnya sekolah yang cerdas dengan sistem manajemen dengan integritas baik berdasarkan konstruksi pendidikan Kristen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa jika transparansi keuangan dapat diterapkan dengan baik maka akan banyak pihak yang akan diuntungkan dan sekolah mendapat meningkatkan akuntabilitas yang baik. Diharapkan dengan penelitian ini, semakin banyak sekolah yang dapat menerapkan transparansi keuangan sekolah.

Kata kunci: keuangan; pengelolaan; transparansi; sekolah ; konstruksi pendidikan Kristen

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan dan potensi yang sangat menentukan jalannya suatu proses pendidikan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian (Ms, 2021). Tanpa sistem pengelolaan keuangan yang baik maka sistem pendidikan akan tersendat bahkan akan mengakibatkan pro dan kontra produktivitas sekolah. Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam mengalirnya pendidikan pada sebuah sekolah. Sumber keuangan bisa dapat diperoleh dari

berbagai pihak baik dari sekolah, pemerintah, komite sekolah maupun dari pihak lainnya. Ketika dana masuk dalam keuangan sekolah, maka harus disiapkan sebuah sistem manajemen pengelolaan keuangan sekolah yang jujur dan profesional.

Salah satu masalah manajemen keuangan yang sering terjadi dalam sekolah adalah penyusunan laporan keuangan yang penuh manipulasi dan penyalahgunaan keuangan sekolah untuk kepentingan pribadi. Dikutip dari laman resmi Indonesia Corruption Watch (ICW), masih banyak terjadi korupsi dalam ranah pendidikan yang salah satunya terjadi pada Program Indonesia Pintar yang diasosiasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Desember 2022, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya membongkar kasus dugaan korupsi dana PIP di Kabupaten Tasikmalaya yang menciptakan kerugian bagi pelajar hampir di 300 sekolah. Korupsi juga banyak terjadi pada Program Indonesia Pintar yang menjadi program prioritas Joko Widodo. Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu pembiayaan personal pendidikan seperti perlengkapan sekolah dengan bentuk bantuan berupa uang tunai.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik sejak tahun 2020 hingga 2022 bahwa angka putus sekolah di Tingkat SD, SMP, SMA cenderung meningkat, diduga salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatkan korupsi dana bantuan pendidikan. Jika disederhanakan, kebanyakan penyelewengan dana PIP terjadi di tingkat pendidikan dasar (49%), diikuti oleh tingkat menengah pertama (31%), tingkat menengah kejuruan (11%), dan tingkat menengah atas (9%). Kepala sekolah dan guru adalah aktor yang paling sering dilaporkan terlibat dalam penyelewengan tersebut. Mereka melakukan penyalahgunaan dana PIP dengan cara memotong anggaran atau menggelapkan dana tersebut (Alamsyah, 2023).

Suyatmiko dan Nikola (2019) mengemukakan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia hingga tahun 2019 masih berada pada angka 50, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada keadaan darurat korupsi (ISMANTO, 2021). Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan manajemen keuangan sekolah yang masih minim yang mengakibatkan banyak timbul penyimpangan dalam mengelola keuangan. Sama halnya dengan manajemen pendidikan lainnya, manajemen keuangan menjadi salah satu substansi manajemen yang akan menentukan berjalannya kegiatan di sekolah. Manajemen keuangan yang bertujuan untuk memperoleh dan mencari kesempatan untuk pendanaan bagi kegiatan pendidikan di sekolah, agar dapat menggunakan dana semaksimal mungkin, membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Rokhman, 2018).

Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi dilakukan melalui perencanaan anggaran (budgeting) sekolah, pembukuan (accounting) keuangan sekolah, pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah (Sukma & Nasution, 2022a). Rancangan suatu sistem informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan suatu aplikasi sistem informasi keuangan yang cocok digunakan oleh sekolah, sehingga di kemudian hari bisa digunakan sebagai sarana untuk mempermudah dan mengatasi kesalahan kesalahan yang sering terjadi dalam proses pencatatan keuangan dan pencatatan laporan keuangan di sekolah (Awaludin et al., 2021). Pengelolaan keuangan sekolah dalam menjalankan rencana anggaran sudah berjalan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa rencana kegiatan yang terealisasi sesuai dengan harapan yaitu transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik untuk membangun (Hidayat, 2022).

Disinilah peran Manajemen Keuangan sekolah dalam membentuk prinsip transparansi keuangan untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan menggunakan berbagai sumber keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pendanaan, dicatat dengan transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Menurut Ristifani (2009) dan Suyanto (2007) yang dikutip oleh penelitian Daniel dan Rediana (2014) bahwa penerapan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, berpengaruh cukup kuat terhadap kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BUMN (Utama & Setiyani, 2014). Jika manajemen keuangan sekolah dilaksanakan secara transparan secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi dan kinerja tenaga kependidikan di sebuah sekolah.

Motivasi dapat didefinisikan adalah proses yang menjelaskan kuantitas, arah dan ketekunan seorang tenaga pendidik dalam mengajar sehingga tercapai suatu tujuan. Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas publik yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (Tandililing, 2019). Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa transparansi keuangan harus diimplementasikan sebagai salah satu bentuk manajemen keuangan dalam meningkatkan kualitas keuangan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah mengimplementasikan transparansi keuangan sebagai bentuk manajemen keuangan sekolah sehingga dapat mewujudkan sekolah yang cerdas dengan sistem manajemen keuangan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Menurut Zed (2004), ada empat studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2012), studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang tengah diteliti. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah tipe penelitian yang cenderung mementingkan analisis data dan informasi. Jadi, penekanannya dapat diberikan pada proses dan signifikansi, dengan teori sebagai panduan untuk menjaga supaya fokus penelitian berdasarkan realitas yang ditemukan di dalam obyek penelitian (Et.al 2024). Bahan pustaka yang didapatkan dari berbagai referensi dan dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung preposisi dan gagasan.

PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai bentuk implementasi manajemen sekolah yang menjadi salah satu faktor yang menentukan kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam memanajemen setiap pelaku perlu mengerti, menerangkan, meramal, dan mengendalikan sesuatu kejadian pada masa kini melalui upaya pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terus-menerus supaya mendapatkan kesuksesan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama (Amid 2023). Sebagaimana substansi manajemen pendidikan, manajemen keuangan juga dilakukan melalui berbagai tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, perkoordinasian, pengawasan dan pengendalian. Indra Bastian (2015) berpendapat bahwa pendidikan dapat didefinisikan sebagai: Pertama, seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta segala keterampilan yang diperlukan. Kedua, seni dan ilmu untuk mengelola keuangan agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ketiga, proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Sukma & Nasution, 2022b). Menurut Depdiknas (2000) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan proses melaporkan keuangan (Andiawati - -, 2017).

Sumber keuangan dan pembiayaan pada sebuah sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; 2) Orang tua atau peserta didik; 3) Masyarakat, baik masyarakat yang mengikat atau tidak mengikat. Berkaitan dengan sumber keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (Karyatun, 2018). Pengeluaran sekolah dapat dijabarkan dalam beberapa hal seperti biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan pada jangka waktu tertentu seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional seperti biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Sementara biaya pembangunan dapat berupa biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan fasilitas sekolah, serta biaya atau pengeluaran lainnya untuk barang-barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang (Karyatun, 2018).

Dalam pelaksanaan Manajemen keuangan harus dilaksanakan secara sistematis dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan anggaran sampai pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik diperlukan dalam pengelolaan dana pendidikan (Sukma & Nasution, 2022b). Manajemen keuangan juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini mengadopsi sistem pembagian jabatan dan fungsi yang terdiri dari otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan penerimaan dan pengeluaran anggaran, yang dalam sekolah yang mengambil peran ini adalah kepala sekolah. Ordonator adalah pihak yang berwenang melakukan pengujian dan berhak untuk memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan izin yang telah ditetapkan, dalam hal ini juga dipegang oleh kepala sekolah. Adapun Bendaharawan adalah pihak yang berwenang untuk menerima,

menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat - surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta membuat catatan perhitungan dan pertanggungjawaban (Dewi & Listiadi, 2021).

Di sekolah orang yang bertugas pada bidang keuangan disebut sebagai manajer bagian keuangan. Sebagai manajer keuangan memiliki fungsi yang dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu: a) Bendaharawan (treasurer). Bendaharawan bertanggung jawab atas perolehan dana dan penggunaannya, selain itu bertugas untuk menjadi beberapa hal berikut: 1) Pengadaan dana berupa uang tunai; 2) Membuat laporan keuangan kas dan modal kerja; 3) Menyusun anggaran kas; 4) Manajemen kredit, asuransi dan urusan jangka waktu pekerja. 5) Akuntansi (controller). Bagian akuntansi bertanggung jawab dalam mencatat dan membuat laporan keuangan sekolah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Menyusun anggaran dan laporan keuangan; 2) Urusan pengkajian keuangan; 3) Menghitung pajak sekolah; 4) Memeriksa inside corp (Shafratunnisa, 2016). Jadi berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjamin berhasil sebuah sistem manajemen keuangan sekolah mengacu pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana yang tersedia dengan berfokus pada kebutuhan pokok dan skala prioritas pada sekolah.

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal membutuhkan dukungan sarana prasarana, agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi. Dengan sistem manajemen keuangan yang terkelola dengan baik maka akan menghadirkan sarana prasarana yang memadai, kegiatan sekolah dapat terlaksana dengan baik. Dengan sarana prasarana yang memadai dapat menjadi faktor pendukung prestasi siswa. Manajemen keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: (a) Transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan, keterbukaan ini dalam manajemen keterbukaan terhadap melakukan suatu program atau kegiatan; (b) akuntabilitas, akuntabilitas yang dimaksudkan adalah keadaan dimana lembaga yang dapat dinilai oleh publik karena hasil kerja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Ada tiga pilar utama dalam menciptakan akuntabilitas, yaitu adanya transparansi dari penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan memberikan ruang kepada komponen sekolah dalam mengelola kegiatan, standar kerja yang dapat diukur dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya; (c) Efektivitas adalah sebuah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam manajemen keuangan kondisi dikatakan efektif adalah ketika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas sesuai dengan tujuan lembaga dengan pengeluaran yang diharapkan; (d) Efisiensi berkaitan dengan kuantitas dari hasil kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara

pemasukan dan keluaran berupa dana, daya dan waktu. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dan hasil (Shafratunnisa, 2016).

Pengelolaan keuangan sekolah bertujuan agar pihak penyelenggara pendidikan dapat merencanakan perolehan dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai satuan pendidikan. Harmono yang dikutip oleh Shafratunnisa (2016) mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan kekayaan stakeholders, yang berarti meningkatkan nilai organisasi yang merupakan ukuran yang akan dinilai oleh publik dan menjadi orientasi pada kelangsungan hidup satuan pendidikan (Shafratunnisa, 2016). Selanjutnya Hermino menjelaskan bahwa tujuan manajemen pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut: a) Menjamin agar dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan harian sekolah dan kelebihan dana yang ada diinvestasikan kembali. b) Memelihara aset sekolah. c) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan (Shafratunnisa, 2016). Maka dari pendapat diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk membuat nilai tambah dan mendapatkan sumber pendanaan keuangan sekolah agar dapat melakukan seluruh kegiatan di sekolah dan menjamin segala proses pencatatan keuangan sekolah.

Transparansi Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip tersebut juga termuat dalam Undang - undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan yang jelas ;jernih ;nyata; menyatakan keadaan yang dapat ditembus oleh cahaya (*Arti Kata Transparansi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*). Maka dengan kata lain sistem transparansi keuangan adalah sistem pengelolaan keuangan yang jernih, nyata, jelas dan dapat dilihat oleh berbagai pihak. Transparansi juga dapat diartikan sebagai proses mengelola segala sesuatu dengan keterbukaan. Dalam bidang pendidikan manajemen keuangan yang transparan adalah adanya keterbukaan lembaga pendidikan yang lebih rinci mengenai sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya sehingga dapat memudahkan pihak - pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Andiawati - -, 2017). Diharapkan dengan adanya sistem transparansi keuangan dapat menciptakan manajemen keuangan yang terpercaya. Lodge yang dikutip dari Daniel (2014) menyatakan bahwa “accountability are concerned with the demands on an agent to report on certain activities and the ability to impose sanctions” yang dapat disimpulkan bahwa pelaporan dalam bidang -

bidang yang dilaksanakan akan mempengaruhi akuntabilitas yang baik (Utama & Setiyani, 2014).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau keharusan untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya pertanggungjawaban kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Secara garis besar, akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah (Tandililing, 2019). Maka, transparansi keuangan sekolah akan mendorong terciptanya kepercayaan publik untuk selalu memberikan dukungan kepada sekolah dalam penyelenggaraan sekolah. Transparansi keuangan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya dan dukungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap sekolah. Dukungan yang diberikan dapat dukungan penyediaan informasi dan memberikan akses kemudahan dalam memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Contoh transparansi keuangan dapat berupa rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempelkan pada dinding pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa saja yang melihat informasi tersebut (Karyatun, 2018). Orang tua siswa dapat mengetahui bagaimana keuangan sekolah dan digunakan untuk apa saja dana tersebut.

Dari keterbukaan inilah, orang tua dan masyarakat akan memberikan kepercayaan terhadap sekolah. Bolang dalam Khoirunisa dkk (2022) mengemukakan bahwa transparansi keuangan sekolah memungkinkan semua orang untuk mengawasi dan menilai jalannya proses keuangan dan memastikan jalannya alokasi keuangan secara tepat (Habibatulloh et al., 2022). Menurut Hermansyah (2018) akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dapat mempengaruhi kualitas layanan sekolah. Kualitas layanan pendidikan mencakup pemberian layanan pendidikan yang maksimal, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Transparansi keuangan juga menjadi sebuah fitur penting dalam kebijakan keuangan. Transparansi keuangan juga memungkinkan terjadinya reduksi terjadinya korupsi (Habibatulloh et al., 2022). Maka sesuai dengan pendapat diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa transparansi keuangan sekolah ada sebuah sistem keuangan yang dapat dilihat secara terbuka kepada publik dan memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas manajemen keuangan sekolah.

Tujuan dan Manfaat Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan sekolah juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen keuangan sekolah. Efektifitas yang dimaksud adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen keuangan sebuah pengelolaan keuangan sekolah yang efektif adalah keadaan keuangan yang dapat membiayai seluruh aktivitas sekolah sesuai dengan tujuan lembaga dan output yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi sendiri berkaitan dengan angka keberhasilan pengelolaan keuangan yang tengah diterapkan. Efisiensi sendiri merupakan perbandingan antara jumlah dana yang masuk dengan dana yang dikeluarkan (Shafratunnisa, 2016). Transparansi keuangan sekolah juga bertujuan untuk menjamin agar dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan dalam sekolah dan kelebihan dana dapat diinvestasikan kembali. Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan maka seluruh pihak dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan usulan dalam penggunaan dana sekolah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Harmono (2009) bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan sekolah bertujuan untuk memaksimalkan keuangan stakeholders. Stakeholders adalah individu atau lembaga yang berkepentingan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Dalam dunia pendidikan, stakeholders terdiri dari kepala sekolah, karyawan, komite, orang tua, masyarakat dan pemerintah yang secara langsung terlibat dalam memberikan dukungan dan memberikan pengawasan terhadap rencana - rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah (Habibatulloh et al., 2022).

Stakeholders bertugas untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar dan memfasilitasi upaya peningkatan kerja dan profesionalisme kepala sekolah, guru dan staf yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, stakeholders menjadi salah satu sumber dana bagi sekolah. Jika dalam pengelolaan keuangan sekolah diterapkan prinsip transparansi keuangan akan membangun kepercayaan daripada stakeholders karena sistem keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi keuangan membawa dampak yang sangat baik pada sistem manajemen keuangan dengan menciptakan organisasi yang lebih efektif, efisien dan terbuka terhadap aspirasi publik terhadap pengelolaan keuangan sekolah (Mubin, 2018). Transparansi keuangan juga dapat meningkatkan kinerja pegawai pada sekolah serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Dengan melihat tujuan dan manfaat transparansi keuangan, maka peneliti simpulkan bahwa transparansi keuangan harus segera diterapkan dalam setiap sistem manajemen keuangan sekolah.

Strategi Implementasi Transparansi Keuangan

Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan sekolah. Salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana pendidikan. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan, sekolah harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengelolaan keuangan. Di dalam standar operasional prosedur terdapat beberapa hal: (1) sistem penganggaran; (2) sistem penerimaan; (3) sistem pengelolaan bon sementara; (4) prosedur pengelolaan utang dan piutang; (5) sistem pembayaran biaya personil; (6) prosedur pengadaan barang dan jasa; (7) sistem pengelolaan kas kecil.

Dalam penulisan standar operasional prosedur harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing - masing karena sistem pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah pasti berbeda- beda (Shafratunnisa, 2016). Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, tentunya dengan memberikan anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun atau per semester. Dengan demikian, segala rincian biaya dapat diketahui oleh berbagai pihak termasuk stakeholder dan peserta didik. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dimaksudkan, sekolah memberikan informasi anggaran dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran sehingga memberikan pemahaman kepada guru, karyawan dan orang tua siswa untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengatur keuangan sekolah, sekolah harus memiliki seorang yang bertugas untuk melakukan audit internal. Proses audit adalah kegiatan evaluasi terhadap sistem pengelolaan keuangan sekolah. Untuk melakukan audit keuangan, tim audit melihat laporan keuangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yaitu direktur dan kepala keuangan serta pihak yang menerima hasil audit keuangan adalah yayasan. Manfaat penting dari adanya transparansi anggaran adalah meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Segala sesuatu mengenai tata kelola keuangan harus dikelola secara transparan termasuk kebijakan mengenai kenaikan gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kenaikan SPP juga harus diberitahukan kepada orang tua murid melalui surat edaran. Maka dapat disimpulkan jika penerapan transparansi keuangan sudah dilakukan dengan baik oleh seluruh elemen sekolah maka kerangka kerja sekolah juga menjadi kelas dan tingkat akuntabilitas yang baik.

Berdasarkan Konstruksi Pendidikan Kristen

Dalam meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan sekolah berdasarkan konstruksi pendidikan Kristen, metode transparansi memegang peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diketahui dan dipahami, antara lain: *Pertama*, Prinsip ketaatan pada firman Tuhan. Alkitab memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, dalam Amsal 11:1 dikatakan, "Timbangan curang adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi takaran yang tepat adalah kesukaanNya." Ini menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam mengelola keuangan. *Kedua*, Panggilan untuk menjadi pengurus yang baik.

Dalam 1 Petrus 4:10, diajar untuk "memanfaatkan karunia yang telah diberikan oleh Allah itu untuk saling melayani sebagai pengurus yang baik dari segala macam kasih karunia Allah." Ini mencakup tanggung jawab untuk mengelola keuangan sekolah dengan bijaksana dan transparan sebagai pengurus yang baik. *Ketiga*, Teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan teladan hidup yang penuh integritas, kejujuran, dan keterbukaan. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun dari para murid-Nya, tetapi sebaliknya, Dia mengajar dengan keterbukaan dan kebenaran. Ini menjadi landasan bagi transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah Kristen. *Keempat*, Prinsip Kebenaran dan Keadilan. Dalam Yohanes 8:32, Yesus berkata, "Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan membuatmu merdeka." Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah sejalan dengan prinsip ini, di mana kebenaran dan keadilan menjadi landasan utama. *Kelima*, Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

Dalam Matius 25:14-30, Yesus mengajarkan tentang tanggung jawab dalam mengelola talenta atau sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah bagian dari tanggung jawab ini sebagai hamba Tuhan yang setia. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip Alkitab dan ajaran kristiani, transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah menjadi sebuah panggilan dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan dan kesaksian hidup sebagai umat Kristen.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan harus dilaksanakan secara sistematis dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan anggaran sampai pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana

sekolah benar - benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem transparansi keuangan adalah sistem pengelolaan keuangan yang jernih, nyata, jelas dan dapat dilihat oleh berbagai pihak. Transparansi juga dapat diartikan sebagai proses mengelola segala sesuatu dengan keterbukaan. Penerapan transparansi keuangan dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada publik terhadap sistem pengelolaan keuangan sekolah dan melibatkan *stakeholders* agar mendapatkan nilai akuntabilitas yang tinggi. Dengan implementasi transparansi keuangan yang dilakukan oleh sekolah akan membantu menopang bangkitnya kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. (2023). Korupsi Dana Bantuan Pendidikan. ICW. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/korupsi-dana-bantuan-pendidikan>
- Amid, M., & Markus. (2023). Manajemen Pendidikan Kristen Dan Kepemimpinan. Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press.
- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah. Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), Article 1. Retrieved from <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10646>
- Arti kata transparansi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://kbbi.web.id/transparansi>
- Awaludin, R. F., Bahri, S., & Muslih, M. (2021). Penerapan Zachman Framework dalam perancangan sistem informasi manajemen keuangan sekolah. Jurnal Teknologi Informasi, 15(1).
- Dewi, M. Z., & Listiadi, A. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga dan literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi siswa akuntansi SMK. EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.965>
- Gea, E. (2024). Sebagai penghubung: Upaya guru PAUD Kristen dalam meningkatkan minat belajar anak usia dini. Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, 6(1).
- Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi tentang akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan sekolah dan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Kaur yang terakreditasi A, B, dan C. The Manager Review, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/tmr.v4i1.25835>
- Hidayat, R. (2022). Pentingnya pengelolaan manajemen keuangan pada sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(2).

- Ismanto, I. (2021). Studi perbandingan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia [Doctoral dissertation, Universitas Jambi]. Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/24669/>
- Karyatun, S. (2018). Mengelola keuangan sekolah. *Ilmu Dan Budaya*, 40(54), Article 54. <https://doi.org/10.47313/jib.v40i54.370>
- Ms, S. (2021). Manajemen keuangan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.56488/scolae.v4i1.86>
- Mubin, N. (2018). Integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v14i2.5>
- Rokhman, A. (2018). Manajemen keuangan sekolah. *Proceeding Annual Conference on Madrasah Teacher*, 1. Retrieved from <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/ACoMT/article/view/926>
- Shafratunnisa, F. (2016). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29717>
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022a). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Sukma, A. H. B., & Nasution, A. M. (2022b). Manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di Bekasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>
- Tandililing, J. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap motivasi mengajar guru di Kabupaten Keerom. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 4(2). <https://doi.org/10.52062/keuda.v4i2.989>
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru. *Dinamika Pendidikan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886>